

Visi Bersama Kelautan Indonesia 2025

Mewujudkan Laut Indonesia yang Terpulihkan, Sehat dan Terlindungi

Laut Indonesia yang 100% terbebas dari praktek perikanan ilegal dan merusak, dan masyarakat lokal nelayan, pesisir dan kepulauan nusantara yang berdaulat, bersahaja dan sejahtera dalam pengelolaan sumberdaya kelautan yang berkelanjutan!

Kami yang setuju dan menandatangani visi bersama ini, secara penuh mendukung pembangunan berkelanjutan tanpa perusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia di seluruh wilayah pesisir dan laut Indonesia serta menyeru Pemerintah Indonesia untuk menjalankan kerangka fikir dan tindakan tersebut diatas, dan mencapai target 100% perairan Indonesia bebas dari setiap praktek perikanan yang ilegal, merusak dan penangkapan ikan berlebihan, dan bersama memastikan terwujudnya laut Indonesia yang sehat untuk generasi bangsa dimasa depan, dengan cara:

1. Menegaskan bahwa setiap pemangku kepentingan harus berkomitmen dan sungguh-sungguh menjalankan prinsip dan tindakan terbaik secara lingkungan dan sosial dalam kegiatan dan pengelolaan perikanan.
2. Menjalankan pembangunan berkelanjutan secara terbuka dan setara bersama masyarakat pesisir dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan untuk memastikan ekosistem vital pesisir dan laut terlindungi, sumber-sumber penghidupan dan mata pencaharian, ketersediaan pangan, hak komunitas dan adat serta kebudayaan dan kearifan lokal tidak dimusnahkan.
3. Memastikan pengaturan yang sangat ketat serta keterpaduan dan keselarasan pengelolaan berbagai aktivitas ekstraktif non-perikanan yang berdampak penting terhadap kelestarian laut dan sumberdaya ikan berdasarkan pendekatan ekosistem dan prinsip keberhati-hatian.
4. Memperkuat pengelolaan pesisir terpadu (Integrated Coastal Management) dengan memperhatikan keserasian pengelolaan hulu-hilir, daerah aliran sungai, dan pulau-pulau kecil dalam rangka mewujudkan keselarasan tata ruang wilayah darat dan laut.
5. Mengontrol, mengevaluasi perizinan dan membatasi penerbitan izin penangkapan ikan secara ketat dan transparan sesuai rekomendasi dari hasil pengawasan dan penelitian ilmiah terhadap daya dukung sumber daya ikan (SDI) di wilayah Perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta menerapkan prinsip kehati-hatian (*precautionary approach*).
6. Memperkuat perikanan skala kecil (small scale fisheries) sebagai pondasi utama dalam sistem perikanan berkelanjutan dan berkeadilan dalam tata kelola perikanan Indonesia, dan memastikan bahwa seluruh nelayan tradisional dan skala kecil Indonesia dilindungi dan mendapatkan hak-haknya untuk mendapatkan jaminan harga ikan yang pantas dan

adil, serta bersama seluruh pekerja perikanan Indonesia baik pada kapal ikan Indonesia (KII) maupun kapal ikan asing (KIA), seutuhnya mendapatkan upah kerja yang layak, lingkungan kerja yang manusiawi, jaminan sosial, jaminan mendapatkan akses dan layanan pendidikan bagi anak nelayan, jaminan keamanan dan keselamatan kerja serta jiwa, dan perlindungan hukum.

7. Memperkuat sistem dan koordinasi antarpihak baik ditingkat lokal, nasional dan internasional dalam pemantauan, pengendalian dan pengawasan (Monitoring Controlling and Surveillance) termasuk memastikan bahwa sepenuhnya alih muat ikan di tengah laut (*transshipment*) ditiadakan.
8. Mencegah migrasi armada kapal ikan asing (KIA) melakukan penangkapan ikan ke- dan di dalam Perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).
9. Mereformasi, melaksanakan dan menegakkan peraturan perundang-undangan nasional dan meratifikasi hukum internasional serta mengambil peran aktif dalam perbaikan rumusan dan pelaksanaan konvensi organisasi pengelolaan perikanan regional, termasuk sejumlah kesepakatan perlindungan keanekaragaman hayati dan genetika serta persetujuan multilateral dan internasional lainnya.
10. Memastikan kejelasan dan keharmonisan rezim pengelolaan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan perairan internasional sekitar Indonesia dengan berpartisipasi dalam organisasi pengelolaan perikanan regional untuk memastikan pengelolaan sumberdaya daya ikan secara bersama dan mendukung secara global penguatan pengelolaan laut di perairan internasional.
11. Menumbuhkembangkan, memperkuat dan memelihara semangat dan solidaritas global dalam perlindungan lingkungan perairan dan pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional, termasuk mewujudkan empat puluh persen (40%) luasan kawasan konservasi di perairan internasional sebagai cagar alam kelautan dunia.

Mari kita bersama bersatu dan berpadu mewujudkan pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab, berkelanjutan dan berkeadilan untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan rakyat Indonesia dan mewujudkannya menjadi bagian dari upaya revitalisasi dan pencapaian Visi Indonesia 2025 !

Lembaga-lembaga Pendukung:

Greenpeace, WALHI Bali, HNSI Bali, Terangi, Wisnu Foundation, Conservation International, KNTI, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Bali Outbond Community, Telapak, Sea Sanctuaries, The Marine Foundation, Kekal Bali, Padma Nuswantara, Perwakilan Nelayan Larantuka, PPLH Bali, Sloka Institute, Frontier Bali, Kelompok Nelayan Singaraja, Fishing & Living, Bali Organic Association, LSPDN NTB, World Wildlife Foundation, Manta Trust, Coral Alliance, Bali Fokus, Sustainable Fisheries Partnership, Plastic Detox, FMN, Packard Foundation, LINI, Pro Demokrasi Perjuangan, Rakyat Bali, Coral Triangle Center, Komunitas Pecinta Alam Bali.